



PENERAPAN OPERASI INTELIJEN STRATEGIS DI KOTAMA OPS TNI DALAM RANGKA MENJAGA KEAMANAN NASIONAL

Yogi Muhamanto¹, Achmad Solihin², G. Royke Deksin³

¹Universitas Pertahanan Republik Indonesia

²Universitas Pertahanan Republik Indonesia

³Universitas Pertahanan Republik Indonesia

* yogi_muhamanto_bintang@yahoo.com, roykedeksino@idu.ac.id

Korespondensi penulis: yogi_muhamanto_bintang@yahoo.com

Abstract. *This study focuses on the implementation of strategic intelligence operations by the Kotama Ops TNI to safeguard national security, particularly in the Kodam Jaya area. As Indonesia's political and economic hub, Kodam Jaya faces multiple threats, including terrorism, radicalism, social conflicts, and transnational crimes. The research aims to analyze the strategies for applying intelligence operations to identify and mitigate these threats. Using a qualitative-descriptive research method, data were collected through in-depth interviews with military experts and document analysis. The findings indicate that the success of strategic intelligence operations heavily relies on cooperation between the TNI and related agencies, the use of advanced technology, and robust coordination with local governments and communities. Recommendations include the modernization of intelligence technology, enhancement of personnel capacities, and improved coordination between military and civilian elements to strengthen national security mechanisms in Kodam Jaya and its surrounding areas.*

Keywords: *Strategic intelligence operations, Kotama Ops TNI, internal threats, national security, Kodam Jaya, technology modernization, military-civil coordination.*

Abstrak. Penelitian ini berfokus pada penerapan operasi intelijen strategis oleh Kotama Ops TNI guna menjaga keamanan nasional, khususnya di wilayah Kodam Jaya. Kodam Jaya, sebagai pusat politik dan ekonomi Indonesia, menghadapi berbagai ancaman seperti terorisme, radikalisme, konflik sosial, dan kejahatan transnasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penerapan operasi intelijen dalam mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para ahli militer dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesuksesan operasi intelijen strategis sangat dipengaruhi oleh kerjasama antara TNI, lembaga terkait, penggunaan teknologi canggih, dan koordinasi yang baik dengan pemerintah serta masyarakat. Rekomendasi penelitian ini mencakup modernisasi teknologi intelijen, peningkatan kapasitas personel intelijen, serta perbaikan koordinasi antara militer dan sipil guna memperkuat mekanisme keamanan nasional di wilayah Kodam Jaya dan sekitarnya.

Kata kunci: Operasi intelijen strategis, Kotama Ops TNI, ancaman dalam negeri, keamanan nasional, Kodam Jaya, modernisasi teknologi, koordinasi militer-sipil

1. LATAR BELAKANG

Sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat keragaman yang tinggi, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan keamanan yang dapat mengancam stabilitas nasional. Menurut Wanzira (2022) dari berbagai ancaman domestik, baik dari kelompok bersenjata maupun non-bersenjata, serta aktivitas kriminal, memerlukan strategi pertahanan yang efektif untuk melindungi kedaulatan negara. DKI Jakarta, sebagai pusat



pemerintahan, ekonomi, dan sosial, sering menjadi sasaran utama kelompok-kelompok yang berusaha mengganggu keamanan nasional. Ancaman ini tidak hanya mencakup terorisme dan kejahatan transnasional, tetapi juga radikalisme ideologi yang berpotensi merusak ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Penelitian ini menelaah penerapan operasi intelijen strategis oleh Kotama Operasi (Kotama Ops) TNI di wilayah Kodam Jaya, yang berperan penting dalam menghadapi serta mengatasi berbagai ancaman tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah menilai efektivitas operasi intelijen dalam proses identifikasi, analisis, serta penerapan langkah-langkah preventif dan responsif terhadap potensi ancaman. Studi kasus yang dilakukan di DKI Jakarta bertujuan untuk memberikan gambaran lebih mendalam terkait dinamika ancaman domestik dan kontribusi intelijen strategis dalam menjaga keamanan nasional.

Menurut CNN (2023) dari peristiwa seperti kebakaran di Depo Pertamina Plumpang dan serangan teror di kawasan Thamrin menunjukkan kerentanan infrastruktur penting serta potensi ancaman terorisme di Indonesia, yang menggarisbawahi kebutuhan akan strategi keamanan yang lebih terpadu dan responsif. Selain itu, kejadian seperti wabah demam berdarah dan kerusuhan saat demonstrasi omnibus law menekankan bahwa ancaman keamanan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan politik.

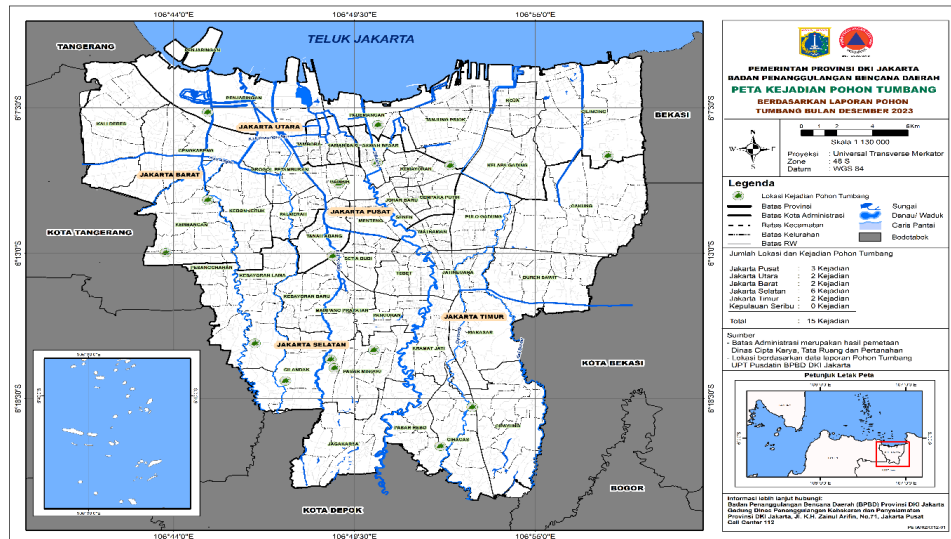
Melalui analisis terhadap peran strategis Kotama Ops TNI dalam menjaga keamanan domestik, penelitian ini juga menyoroti pentingnya koordinasi antara TNI dan Badan Intelijen Strategi (BAIS), serta penggunaan teknologi dan regulasi hukum dalam mendukung operasi intelijen. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi berbasis data guna memperkuat kebijakan dan strategi operasional dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang di Indonesia. Sebagai salah satu komponen utama dalam menjaga keamanan nasional, TNI memiliki tanggung jawab yang besar dalam menghadapi ancaman domestik (Chotimah, H. C. 2019). Kotama Operasi (Kotama Ops) merupakan salah satu unit khusus TNI yang bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan operasi militer maupun non-militer untuk mendukung tugas pertahanan dan keamanan di wilayah masing-masing. Ancaman di DKI Jakarta, sebagai pusat ekonomi dan politik, cenderung lebih kompleks dan beragam.

Kerentanan yang tinggi terhadap ancaman seperti terorisme, radikalisme, konflik etnis, kejahatan lintas negara, serta gangguan keamanan lainnya, menjadikan Jakarta sebagai lokasi yang sangat strategis dan membutuhkan perhatian khusus dalam hal pengamanan (Widyaningsih, R. 2019). Penerapan operasi intelijen strategis oleh Kotama Ops TNI di wilayah Kodam Jaya berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut.

Melalui pengumpulan informasi yang tepat dan analisis yang mendalam, TNI dapat mengidentifikasi potensi ancaman dan merumuskan langkah-langkah preventif maupun responsif yang sesuai untuk menghadapi situasi yang muncul. Studi kasus di DKI Jakarta memberikan wawasan lebih dalam tentang dinamika ancaman domestik, yang akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan serta strategi operasional yang efektif dalam menjaga keamanan nasional.

Peran TNI, khususnya melalui Kotama Operasi (Kotama Ops), menjadi krusial dalam menghadapi berbagai ancaman domestik. Pelaksanaan operasi intelijen strategis di wilayah

Kodam Jaya sangat penting dalam memantau, menganalisis, dan mengambil tindakan preventif terhadap potensi ancaman, menjaga stabilitas di tingkat lokal, dan berkontribusi pada keamanan nasional secara keseluruhan (Sutopo, A. 2022).



Gambar 1. 1 Peta Provinsi DKI Jakarta
Sumber: <https://bpbd.jakarta.go.id/>

Namun, dalam spesifik wilayah Kodam Jaya, terdapat tantangan tersendiri yang perlu diatasi dalam penerapan operasi intelijen oleh Kotama Ops TNI. Sebagai pusat aktivitas politik dan ekonomi, Jakarta rentan terhadap berbagai ancaman seperti terorisme, konflik sosial, serta kejahatan terorganisir (Aminah, S. 2016). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih terarah dan strategis dalam melaksanakan operasi intelijen di wilayah ini, dengan memperhatikan karakteristik dan dinamika khusus yang ada.

Selain itu, Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ancaman Keamanan Negara memberikan arahan dan pedoman bagi pemerintah dalam mengelola berbagai ancaman keamanan negara, baik dari dalam maupun luar negeri. Strategi nasional ini mencakup upaya pencegahan, deteksi, dan penanggulangan berbagai ancaman keamanan, termasuk melalui kegiatan intelijen strategis dan operasi keamanan oleh aparat negara, termasuk TNI.

Dengan adanya landasan hukum tersebut, penerapan operasi intelijen strategis oleh Kotama Ops TNI di wilayah Kodam Jaya akan dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hal ini termasuk dalam hal perlindungan hak asasi manusia dan penggunaan kekuatan yang proporsional dalam melaksanakan tugas-tugas keamanan. Selain itu, kerja sama antara TNI dengan instansi intelijen dan keamanan lainnya juga akan diperkuat untuk meningkatkan efektivitas dalam menghadapi ancaman dalam negeri.



2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Intelijen

Pemahaman tentang peran intelijen dalam proses pembuatan kebijakan strategis menjadi semakin penting dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional. Sherman Kent mendefinisikan intelijen strategis sebagai "pengetahuan yang diperlukan oleh pejabat sipil dan militer untuk menjaga kesejahteraan nasional". Definisi ini diperluas oleh Adda Bozeman yang menekankan bahwa intelijen strategis harus memberikan panduan untuk mencapai tujuan jangka panjang serta menanggapi perkembangan eksternal. Loch Johnson dan James Wirtz menambahkan bahwa intelijen strategis berkontribusi terhadap proses pembuatan kebijakan nasional, memberikan peringatan dini terhadap ancaman jangka pendek dan panjang yang membahayakan kepentingan nasional. Oleh karena itu, intelijen strategis memainkan peran penting dalam membentuk dan mengarahkan kebijakan negara.

Wee Chow How, dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Bambang Waluyo Hidayat berjudul *Perang dan Manajemen*, menguraikan beberapa teori dasar intelijen yang pertama kali diungkapkan oleh Sun Tzu. Sherman Kent menyatakan bahwa intelijen adalah pencarian jawaban yang terbaik, dan intelijen strategis merupakan perpanjangan dari pencarian pengetahuan yang dapat digunakan dalam pembuatan keputusan. Ia juga menggambarkan intelijen sebagai organisasi, aktivitas, dan pengetahuan. Sebagai organisasi, intelijen berfungsi sebagai badan yang mengkoordinasikan operasi untuk mencapai tujuan strategis. Sebagai aktivitas, intelijen melibatkan pengumpulan dan analisis informasi untuk menyusun gambaran yang jelas. Sebagai pengetahuan, intelijen mencakup pemahaman tentang kekuatan, kelemahan, niat, dan tindakan sasaran atau negara lain. Teori dasar intelijen ini berlaku universal dan diadaptasi oleh berbagai negara, meskipun penerapannya dapat berbeda sesuai dengan sistem pemerintahan dan kebutuhan masing-masing.

Intelijen memiliki tiga fungsi utama, yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Fungsi penyelidikan mencakup pengumpulan dan analisis informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan strategis. Fungsi pengamanan bertujuan melindungi institusi dari ancaman internal dan eksternal melalui kontra-intelijen. Fungsi penggalangan adalah upaya mempengaruhi pihak lain agar mendukung kepentingan nasional.

Dalam konteks Tentara Nasional Indonesia (TNI), penerapan teori intelijen sangat krusial untuk menjaga keamanan nasional. Fokus pada pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan informasi memungkinkan TNI memahami ancaman potensial, khususnya di wilayah strategis seperti DKI Jakarta. Kerja sama dengan lembaga lain, seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS), memperkuat efektivitas operasi intelijen. Penggunaan teknologi modern semakin meningkatkan efisiensi pengumpulan dan analisis informasi. Dalam menjalankan tugasnya, TNI juga tetap memperhatikan prinsip hukum dan hak asasi manusia, menjaga kredibilitasnya dalam menjaga keamanan nasional. Dengan demikian, penerapan teori intelijen oleh TNI bukan hanya strategi, tetapi juga kewajiban dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas negara.



2.2 Teori Keamanan Nasional

Ketahanan nasional merupakan sebuah konsep yang berfungsi sebagai alat analisis untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh suatu bangsa, menggunakan pendekatan delapan aspek kehidupan nasional yang dikenal sebagai Astagatra. Astagatra ini terbagi menjadi dua bagian, yakni Trigatra dan Pancagatra. Trigatra meliputi tiga aspek alamiah yaitu geografi, demografi, dan sumber daya alam yang berperan sebagai potensi utama pembangunan bangsa Indonesia dan harus dikelola secara optimal. Di sisi lain, Pancagatra mencakup lima aspek sosial, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, yang sering kali menjadi sasaran ancaman domestik.

Ancaman terhadap Indonesia umumnya menysasar aspek-aspek dalam Pancagatra yang selalu berubah, sehingga peningkatan ketahanan Pancagatra menjadi prioritas untuk memastikan stabilitas nasional yang terintegrasi dengan Trigatra. Kombinasi Trigatra dan Pancagatra menciptakan Astagatra, yang berfungsi sebagai model pemetaan kehidupan nasional bangsa Indonesia. Konsep ketahanan nasional diyakini sebagai pedoman yang perlu diadopsi oleh seluruh bangsa Indonesia, sehingga menciptakan keseragaman pola pikir, sikap, dan tindakan, yang menyeluruh, komprehensif, dan berorientasi pada globalisasi tanpa memandang batasan regional. Konsep ini juga menjadi panduan dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai sinergi di seluruh sektor pembangunan (Modul Materi BS Konsepsi Ketahanan Nasional, 2011).

Dalam disiplin ilmu keamanan nasional, terdapat berbagai teori yang mendefinisikan dan menganalisis aspek-aspek keamanan negara. Buku Ajar Keamanan Nasional oleh Pedrason (2021) mengulas beberapa teori utama, seperti teori tradisional, komprehensif, kritis, keamanan manusia, non-tradisional, maritim, dan siber. Teori tradisional memfokuskan pada perlindungan negara dari ancaman militer eksternal, sementara teori komprehensif memperluas konsep keamanan mencakup dimensi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Teori kritis mengkaji struktur kekuasaan global dan dampaknya terhadap ketidakamanan. Teori keamanan manusia memprioritaskan perlindungan individu dari ancaman seperti kemiskinan, kelaparan, dan kekerasan, sedangkan teori non-tradisional memfokuskan pada ancaman seperti terorisme dan perubahan iklim.

Teori keamanan maritim menyoroti pentingnya keamanan laut bagi negara kepulauan seperti Indonesia, dan teori keamanan siber menekankan perlindungan infrastruktur digital dari serangan. Buku ini memberikan pemahaman menyeluruh bagi akademisi dan praktisi mengenai perkembangan teori keamanan nasional yang dinamis dan terus beradaptasi dengan perubahan zaman.

Di Indonesia, beberapa undang-undang telah mengatur tentang keamanan nasional. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menjadi dasar hukum utama, mencakup definisi, tujuan, strategi, dan pendanaan pertahanan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 mengatur pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan peran pemerintah daerah dalam keamanan nasional. Peraturan terkait lainnya, seperti Ketetapan MPR Nomor



VI/MPR/2000 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011, juga berkontribusi dalam membentuk kerangka hukum keamanan nasional di Indonesia.

2.3 Teori Organisasi Dan Struktur Organisasi

Teori organisasi merupakan konsep yang digunakan untuk menganalisis proses kolaborasi antara individu-individu dalam suatu organisasi, menggambarkan sifat kelompok dalam mencapai tujuan bersama, serta menjelaskan aspek-aspek perilaku seperti motivasi dalam kerjasama organisasi. Menurut Lubis dan Husaini (1987), teori organisasi adalah sekumpulan pengetahuan yang membahas mekanisme kerjasama terstruktur antara individu atau lebih guna mencapai tujuan bersama. Stephen P. Robbins (1994) mendefinisikan teori organisasi sebagai bidang studi yang fokus pada struktur dan desain organisasi, termasuk berbagai perspektif serta deskripsi yang membahas bagaimana organisasi dibentuk, bagaimana strukturnya diatur, dan cara meningkatkan efektivitas organisasi.

Dalam literatur, terdapat berbagai jenis teori organisasi yang dapat diklasifikasikan berdasarkan tiga tingkatan analisis, sebagaimana yang diungkapkan oleh Scott dalam Legard (2010):

- a. **Tingkat Sosial-Psikologis:** Pada tingkatan ini, teori organisasi berfokus pada interaksi interpersonal antara individu di dalam organisasi. Peneliti pada level ini berusaha menjelaskan bagaimana individu berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. **Tingkat Struktural:** Tingkatan ini mengacu pada teori organisasi yang menganalisis struktur keseluruhan organisasi, termasuk subdivisi internal seperti departemen atau tim. Pada level ini, peneliti mengkaji bagaimana unit-unit organisasi saling berhubungan dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi.
- c. **Tingkat Makro:** Pada tingkat makro, teori organisasi berfokus pada hubungan organisasi dengan kelompok atau komunitas eksternal. Penelitian pada tingkat ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana organisasi berinteraksi dengan lingkungannya untuk mencapai tujuan mereka.

Teori organisasi ini menjadi landasan dalam memahami interaksi, struktur, dan lingkungan eksternal yang memengaruhi kinerja serta efektivitas organisasi secara keseluruhan.

2.4 Teori Strategi

Teori strategi merupakan seperangkat konsep dan kerangka kerja yang menjadi pedoman bagi para pembuat keputusan dalam memahami, menganalisis, serta merumuskan langkah-langkah strategis. Teori ini berfungsi untuk membantu organisasi mencapai keberhasilan dengan memberikan perhatian pada faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja organisasi, serta merumuskan strategi yang efektif dan implementatif. Dalam konteks organisasi, pemahaman mendalam terhadap strategi yang diterapkan sangat penting, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi.



Penerapan strategi yang efektif, seperti operasi intelijen oleh Kotama Ops TNI, menjadi hal krusial terutama untuk menghadapi ancaman di masa depan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya, yang berada dalam tanggung jawab Kodam Jaya. Pengelolaan keamanan di wilayah ini tidak hanya penting bagi keamanan lokal tetapi juga berkontribusi pada stabilitas nasional. Dengan demikian, peran Kodam Jaya sangat esensial dalam mendukung keamanan nasional Indonesia secara keseluruhan.

Elemen-elemen utama dari teori strategi meliputi analisis lingkungan, perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi strategi. Analisis lingkungan memungkinkan organisasi memahami dinamika eksternal, sedangkan perumusan strategi membantu dalam menetapkan tujuan serta mengembangkan rencana aksi yang tepat. Implementasi strategi merupakan langkah kunci dalam menjalankan rencana dengan efektif, dan evaluasi strategi diperlukan untuk mengukur keberhasilan dan melakukan penyesuaian bila diperlukan.

Manfaat dari penerapan teori strategi antara lain adalah peningkatan peluang pencapaian tujuan organisasi, adaptasi terhadap perubahan lingkungan, peningkatan efisiensi sumber daya, dan pemberian kerangka kerja yang solid dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa teori strategi populer seperti Model Lima Kekuatan Porter, Analisis SWOT, Strategi Generik Porter, dan Balanced Scorecard menjadi alat penting bagi organisasi dalam menciptakan keunggulan kompetitif.

Beberapa ahli memberikan definisi yang berbeda mengenai strategi. Henry Mintzberg (1987) mendefinisikan strategi sebagai pola tindakan yang konsisten untuk mencapai tujuan organisasi. Michael Porter (1980) berpendapat bahwa strategi adalah penciptaan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, yang memungkinkan perusahaan menempati posisi unik di pasar. Igor Ansoff (1965) mengartikan strategi secara lebih luas, mencakup pertimbangan faktor internal dan eksternal organisasi dalam jangka panjang. Kenneth Andrews (1971) mengemukakan bahwa strategi adalah kombinasi dari tujuan, kebijakan, dan program untuk mencapai hasil yang diinginkan. Fred R. David (2013) mendefinisikan strategi sebagai seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional. Gary Hamel dan C.K. Prahalad (1994) menekankan pentingnya penciptaan keunggulan kompetitif yang unik, sedangkan Michael E. Porter (1996) menekankan bahwa strategi juga mencakup pilihan mengenai apa yang tidak akan dilakukan. Richard Rumelt (2011) berfokus pada pentingnya pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi.

2.5 Teori Implementasi

Teori implementasi adalah sekumpulan konsep dan kerangka kerja yang menjelaskan proses bagaimana kebijakan atau program diubah menjadi tindakan nyata dan hasil yang terukur. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk membantu pembuat kebijakan dan praktisi memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan, serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Dengan demikian, teori implementasi berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan dampak sesuai harapan.



Teori implementasi memiliki beberapa tujuan penting, salah satunya adalah untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Hal ini melibatkan analisis konteks di mana kebijakan akan dijalankan, termasuk faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Selain itu, teori ini juga bertujuan untuk mengembangkan strategi dalam mengatasi hambatan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses implementasi.

Komponen kunci dalam teori implementasi meliputi analisis konteks, perancangan program, pelaksanaan program, serta monitoring dan evaluasi. Analisis konteks bertujuan untuk memahami kondisi lingkungan tempat kebijakan akan diimplementasikan. Desain program yang tepat, pelaksanaan yang efektif, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan menjadi hal penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan.

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi meliputi dukungan politik, keterlibatan pemangku kepentingan, kapasitas implementasi, komunikasi, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi yang baik. Model implementasi seperti top-down, bottom-up, dan campuran sering digunakan sebagai panduan untuk meningkatkan peluang keberhasilan implementasi.

Van Meter dan Van Horn (1975) menyoroti lima faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk komunikasi yang jelas, ketersediaan sumber daya, sikap positif, dukungan organisasi, serta faktor eksternal. Pressman dan Wildavsky (1973) mengidentifikasi delapan model implementasi yang berbeda, seperti model rasional, inkremental, politik, birokrasi, top-down, dan bottom-up, dengan masing-masing pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri.

Elmore (1978) memperkenalkan konsep "implementation gap", yang merujuk pada kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan pelaksanaannya di lapangan. Sementara itu, Mazmanian dan Sabatier (1981) mengemukakan konsep "subsystem policy", yang menekankan pentingnya jaringan aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Kesuksesan implementasi sangat bergantung pada kemampuan subsistem untuk mencapai konsensus terkait tujuan dan strategi implementasi. Teori-teori ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kebijakan dapat diimplementasikan dengan lebih efektif.

2.6 Teori Kampanye Militer

Teori Kampanye Militer memiliki keterkaitan strategis yang erat dengan penerapan operasi intelijen di Kotama Ops TNI. Kampanye militer, dalam konteks ilmu militer, berfungsi sebagai kerangka untuk merumuskan dan menerapkan strategi militer yang efektif dalam operasi-operasi militer. Salah satu elemen penting dalam kampanye militer adalah operasi intelijen, yang berperan sebagai bagian integral dalam pengumpulan informasi akurat mengenai musuh serta situasi operasional, sehingga mendukung optimalisasi keputusan strategis. Pengembangan strategi dalam kampanye militer melibatkan analisis data intelijen yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti pengintaian, pengumpulan informasi, dan analisis mendalam.



Operasi intelijen dalam kampanye militer dirancang untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang musuh, situasi operasional, dan kekuatan yang dimiliki. Informasi ini kemudian digunakan untuk memaksimalkan pengambilan keputusan strategis dan operasional, serta mempersiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan tindakan musuh. Penggunaan data intelijen menjadi sangat krusial dalam memastikan keputusan yang diambil dapat merespons dinamika situasi dengan lebih tepat dan cepat.

Kampanye militer juga melibatkan sejumlah elemen penting seperti pengembangan strategi, operasi intelijen, analisis data, serta keahlian khusus dan umum yang diperlukan untuk optimalisasi keputusan strategis dan operasional. Sebagai landasan operasional, kampanye militer diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Keputusan Panglima TNI No. Kep/1059/XII/2020, yang merupakan elaborasi dari Operasi Militer Perang (OMP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa tugas utama TNI mencakup operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.

Teori lain yang memperkaya konsep kampanye militer adalah teori "ends, ways, and means" dari Arthur F. Lykke Jr. dan Hart. Kerangka ini sering digunakan dalam perencanaan militer dan strategis. Dalam konteks pertahanan, teori ini mendukung perencanaan untuk menghadapi konflik yang berlarut-larut, seperti dalam mengantisipasi konflik di Laut China Selatan. Tiga elemen penting dari teori ini adalah:

- a. **Ends (Tujuan):** Fokus pada mengurangi radikalisme di Indonesia, mencakup penanggulangan aktivitas terorisme dan mengatasi akar penyebab radikalisasi dan ekstremisme. Target yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART) perlu ditetapkan, misalnya, menurunkan persentase individu yang ter-radikalisasi dalam jangka waktu tertentu.
- b. **Ways (Cara):** Mengacu pada strategi dan pendekatan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, dengan pendekatan multi-aspek yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan sektor. Pendekatan ini mencakup pendidikan, keterlibatan masyarakat, kampanye kontra-narasi, dan peningkatan kohesi sosial.
- c. **Means (Sumber Daya):** Sumber daya yang tersedia, seperti keuangan, infrastruktur, personel, teknologi, dan kemitraan. Kemitraan domestik dan internasional yang kuat diperlukan untuk memastikan sumber daya dan keahlian yang dibutuhkan tersedia untuk menangani radikalisme secara efektif.

Dengan pendekatan strategis yang terukur dan kolaboratif, penerapan teori kampanye militer dan operasi intelijen di Kotama Ops TNI dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitik kualitatif, yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meneliti objek penelitian secara menyeluruh dengan menggali dan memahami makna dari data yang diperoleh. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam



pengumpulan dan analisis data melalui metode observasi, wawancara, dan analisis dokumen, guna mendapatkan pemahaman mendalam terkait objek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode triangulasi, yang menggabungkan berbagai sumber atau teknik untuk memastikan validitas dan keandalan data yang diperoleh. Dengan menggunakan beragam teknik, peneliti dapat memperoleh perspektif yang lebih luas dan menyeluruh tentang fenomena yang sedang diteliti. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif, berfokus pada pengungkapan makna dari data yang terkumpul. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami konteks, pola, dan hubungan antarvariabel tanpa harus menggunakan metode statistik atau pengukuran kuantitatif (Sugiyono, 2015).

Melalui penerapan pendekatan analitik kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pengelolaan sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kemampuan Kotama Ops TNI dalam menghadapi ancaman militer dan non-militer di lingkungan intelijen Kodam Jaya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah dan Perkembangan Intelijen TNI di Indonesia

Intelijen dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki peranan yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Sejak pembentukannya, intelijen TNI telah mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan informasi untuk kepentingan negara. Tugas utama intelijen TNI mencakup tiga fungsi utama: penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan, yang semuanya dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan operasional secara efektif. Fungsi penyelidikan fokus pada pengumpulan serta analisis informasi yang diperlukan untuk mendukung pembuatan kebijakan, dengan menekankan pemahaman mendalam terhadap kapasitas, kelemahan, niat, serta tindakan target tertentu.

Informasi yang akurat dan tepat waktu sangat penting bagi TNI dalam merumuskan strategi yang efektif dalam menghadapi berbagai ancaman. Fungsi pengamanan lebih diarahkan pada perlindungan internal dan kontra-intelijen, yang mencakup upaya menjaga institusi dan informasi sensitif dari ancaman eksternal maupun internal, seperti spionase dan sabotase. Fungsi penggalangan bertujuan untuk mempengaruhi aktor-aktor tertentu agar mendukung kepentingan nasional, melalui pengumpulan informasi dan operasi yang sesuai dengan kepentingan strategis.

Struktur intelijen TNI dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas operasional. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti Badan Intelijen Strategis (BAIS), menjadi komponen penting dalam operasi intelijen TNI. Selain itu, penerapan teknologi canggih telah meningkatkan kemampuan pengumpulan dan analisis informasi, menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan strategis, TNI terus beradaptasi untuk memastikan intelijen tetap relevan dalam mendukung keamanan nasional.



Secara keseluruhan, evolusi fungsi dan struktur intelijen TNI menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam menjaga keamanan negara. Implementasi yang efisien dari operasi intelijen mendukung stabilitas nasional dan memungkinkan TNI menjalankan perannya secara optimal dalam menghadapi berbagai ancaman. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar pada metode dan pendekatan intelijen TNI, memungkinkan mereka untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman dengan lebih cepat dan akurat.

Saat ini, intelijen TNI memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional, dengan terus menyesuaikan diri terhadap dinamika ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Sejarah perkembangan intelijen TNI mencerminkan upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan efektivitas dan kemampuan mereka dalam mempertahankan kedaulatan negara dan melindungi warga negara.

4.2 Karakteristik dan Tantangan Wilayah Operasi Kodam Jaya

Wilayah operasi Kodam Jaya meliputi Jakarta dan sekitarnya, yang memiliki peran strategis sebagai pusat politik, ekonomi, dan budaya Indonesia. Sebagai ibu kota negara, Jakarta menghadirkan tantangan geografis yang kompleks, dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Kawasan ini tidak hanya mencakup pusat bisnis dan pemerintahan, tetapi juga area permukiman padat dan wilayah pinggiran yang beragam. Kondisi demografi yang heterogen ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam hal mobilitas, infrastruktur, dan pelayanan publik. Wilayah ini juga kaya akan keragaman sosial, dengan populasi yang berasal dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan agama. Keragaman ini, meskipun menjadi kekuatan, juga berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan konflik antar kelompok. Dari segi ekonomi, Jakarta berfungsi sebagai pusat keuangan dan perdagangan terbesar di Indonesia, namun ketimpangan ekonomi yang signifikan antara kelompok kaya dan miskin memperburuk ketegangan sosial. Selain itu, Jakarta kerap menjadi pusat perhatian dalam berbagai peristiwa politik nasional, seperti pemilihan umum dan demonstrasi besar.

Ancaman keamanan di wilayah Kodam Jaya sangat beragam, termasuk terorisme, kejahatan terorganisir, dan konflik sosial. Sebagai pusat aktivitas politik dan ekonomi nasional, Jakarta sering menjadi target kelompok teroris yang ingin menciptakan ketidakstabilan. Selain itu, kejahatan terorganisir, seperti perdagangan narkoba dan kejahatan siber, menjadi ancaman serius yang membutuhkan perhatian khusus. Konflik sosial, yang sering kali dipicu oleh ketidakpuasan ekonomi atau isu politik, juga dapat memicu kerusuhan dan gangguan terhadap stabilitas di wilayah ini. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi geografis, demografis, serta konteks sosial, ekonomi, dan politik di wilayah Kodam Jaya, TNI dapat merumuskan strategi dan operasi intelijen yang lebih tepat sasaran. Penanganan ancaman keamanan yang kompleks membutuhkan koordinasi yang kuat dan pendekatan yang terintegrasi di antara berbagai satuan tugas di bawah komando Kodam Jaya.

4.3 Penerapan Operasi Intelijen Strategis di Kotama Ops TNI dalam Menjaga Keamanan Nasional

Operasi intelijen strategis merupakan elemen fundamental dalam menjaga keamanan nasional, terutama ketika dihadapkan dengan ancaman dalam negeri yang semakin kompleks dan dinamis. Kodam Jaya, sebagai salah satu Komando Utama Operasi (Kotama Ops) TNI



yang berada di wilayah strategis, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas dan keamanan di ibu kota dan sekitarnya. Dalam hal ini, penerapan strategi intelijen strategis menjadi sangat penting untuk mendeteksi, mencegah, dan menanggulangi berbagai potensi ancaman yang mungkin timbul. Berdasarkan wawancara dengan berbagai narasumber kunci, termasuk Asintel Mabes TNI, Asintel Kasad, Asintel Kodam Jaya, serta pejabat di Korem dan BAIS Wilayah Jakarta, disepakati bahwa Kodam Jaya telah siap melaksanakan operasi intelijen strategis.

Dari hasil wawancara, Asintel Kasdam Jaya menekankan bahwa tantangan di wilayah ini membutuhkan respons yang cepat dan tepat, yang hanya dapat dicapai melalui perencanaan operasi intelijen yang matang. Hal ini sesuai dengan *Teori Intelijen* yang menyatakan bahwa pengumpulan dan analisis informasi yang akurat adalah dasar bagi pengambilan keputusan yang efektif (Febrianto dan Mufidah, 2019). Penerapan teknologi modern seperti SIG, drone, dan teknologi pengenalan wajah sebagaimana diungkapkan oleh Asintel Mabes TNI, juga memperkuat argumentasi ini, menunjukkan relevansi *Teori Strategi* yang menekankan pentingnya sumber daya teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Penelitian Kuswara (2019) sejalan dengan hasil ini, yang menunjukkan bahwa kontra intelijen Indonesia sangat bergantung pada kerjasama lintas lembaga untuk mendeteksi dan mencegah ancaman, khususnya spionase asing. Hal ini terkait dengan *Teori Organisasi dan Struktur Organisasi*, yang menyatakan bahwa desain organisasi yang efektif sangat penting dalam meningkatkan sinergi antara entitas yang terlibat untuk mencapai tujuan bersama.

Asintel Mabes TNI menekankan peran teknologi dalam meningkatkan kemampuan deteksi dan analisis situasi. Ini sesuai dengan penelitian Prakoso (2019) yang menunjukkan bahwa penggunaan teknologi canggih, seperti drone dan pengolahan gambar, sangat efektif dalam mendukung operasi intelijen. *Teori Keamanan Nasional* mendukung pandangan ini, karena teknologi yang tepat dapat memperkuat pertahanan negara terhadap ancaman yang bersifat militer maupun non-militer. Di wilayah Kodam Jaya, ancaman keamanan seperti terorisme, kejahatan terorganisir, dan konflik sosial menuntut penggunaan teknologi dalam pemantauan dan pengumpulan data untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat.

Meskipun Kodam Jaya menunjukkan kesiapan yang signifikan, wawancara juga mengungkapkan tantangan dalam implementasi strategi intelijen strategis, khususnya terkait keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Hal ini sesuai dengan *Teori Implementasi* yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk personel maupun teknologi (Van Meter & Van Horn, 1975). Asintel Kodam Jaya menyebutkan bahwa modernisasi peralatan dan pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk memenuhi tuntutan intelijen modern, yang merupakan faktor kunci dalam memastikan efektivitas operasi di lapangan.

Terdapatnya beberapa keterbatasan, termasuk akses terhadap data operasional yang terbatas dan cakupan penelitian yang hanya mencakup wilayah Kodam Jaya. Hal ini menyebabkan temuan-temuan penelitian mungkin tidak sepenuhnya berlaku untuk wilayah lain dengan karakteristik ancaman yang berbeda. Selain itu, aspek hukum yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan operasi intelijen, seperti yang diungkapkan oleh Febrianto dan Mufidah (2019), juga memerlukan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian lanjutan



yang lebih komprehensif dan dengan akses yang lebih mendalam terhadap data operasional sangat diperlukan untuk memperkaya temuan ini.

4.4 Implementasi Strategi Penerapan Operasi Intelijen Strategis Oleh Kotama Ops TNI Di Wilayah Kodam Jaya

Operasi intelijen strategis adalah komponen kunci dalam menjaga keamanan nasional, terutama ketika dihadapkan pada ancaman dalam negeri yang kompleks dan dinamis. Sebagai salah satu wilayah strategis di Indonesia, Kodam Jaya memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk menjamin stabilitas di ibu kota dan sekitarnya. Melalui wawancara dengan berbagai narasumber seperti Asintel Mabes TNI, Asintel Kasad, Asintel Kodam Jaya, serta pejabat dari Korem dan BAIS Wilayah Jakarta, ditemukan bahwa Kodam Jaya telah siap melaksanakan operasi intelijen strategis.

Meskipun UU No. 17 Tahun 2011 menjadi landasan hukum bagi operasi intelijen, regulasi ini dinilai belum cukup spesifik dalam menangani ancaman seperti terorisme dan kejahatan siber. Menurut *Teori Intelijen*, operasi intelijen yang efektif memerlukan dukungan hukum yang kuat, termasuk pengaturan yang lebih detail mengenai penggunaan teknologi canggih dan sinergi antara lembaga seperti BIN dan BAIS. Hal ini relevan dengan penelitian Prakoso (2019) yang menekankan pentingnya teknologi dalam meningkatkan efektivitas pengumpulan data intelijen.

Selain itu, sinergi antar-lembaga menjadi elemen penting dalam operasi ini, seperti yang disoroti oleh *Teori Organisasi dan Struktur Organisasi*. Penelitian Kuswara (2019) tentang kontra-intelijen menunjukkan bahwa struktur organisasi yang kuat dan kerjasama lintas lembaga dapat meningkatkan efektivitas operasi intelijen. Wawancara dengan Kasiintel Korem 051/Wkt dan Kasiintel Korem 052/Wkr menegaskan bahwa tanpa kerjasama yang kuat antar lembaga seperti TNI, Polri, dan BIN, operasi intelijen strategis akan menghadapi hambatan dalam implementasinya.

Asintel Kodam Jaya menekankan perlunya buku petunjuk operasional yang lebih terperinci untuk mengurangi ambiguitas di lapangan. Dalam *Teori Implementasi*, keberhasilan pelaksanaan operasi intelijen tidak hanya bergantung pada teknologi dan sumber daya, tetapi juga pada kejelasan instruksi dan panduan. Evaluasi reguler terhadap regulasi dan panduan operasional akan memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan dinamika ancaman yang berkembang, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini didukung oleh wawancara dengan Asintel Mabes TNI, yang menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum dan standar operasional harus diutamakan dalam operasi intelijen strategis.

Teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan pemantauan satelit menjadi faktor penting dalam mendukung operasi intelijen. Menurut *Teori Strategi*, penggunaan sumber daya teknologi adalah kunci dalam mencapai tujuan strategis, termasuk dalam operasi intelijen. Penelitian Prakoso (2019) yang mengkaji penggunaan drone dalam operasi intelijen menunjukkan bahwa teknologi dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan data dan respons terhadap ancaman.

Hal ini juga terlihat dalam wawancara dengan Asintel Mabes TNI, di mana teknologi seperti SIG (Sistem Informasi Geografis) dan drone digunakan untuk meningkatkan pemantauan dan analisis ancaman di wilayah Kodam Jaya. *Teori Kampanye Militer*



mendukung pentingnya integrasi teknologi dalam kampanye militer, menunjukkan bahwa teknologi yang tepat dapat mempercepat pengambilan keputusan dan respons di lapangan.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa keterbatasan dalam implementasi operasi intelijen strategis. Pertama, akses terhadap data operasional yang mendalam sangat terbatas, yang menyebabkan analisis lebih banyak bergantung pada wawancara narasumber kunci. Kedua, cakupan penelitian yang terbatas pada wilayah Kodam Jaya mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di wilayah lain dengan karakteristik ancaman yang berbeda.

Dari sudut pandang *Teori Keamanan Nasional*, operasi intelijen strategis harus selalu beradaptasi dengan ancaman yang berubah-ubah, seperti terorisme, sabotase, dan kejahatan siber. Koordinasi yang lebih erat dengan lembaga seperti Polri dan BIN diperlukan untuk memastikan bahwa respons terhadap ancaman dilakukan dengan cepat dan efektif. Penelitian Nugroho dan Wahyudi (2018) juga menunjukkan bahwa sinergi lintas lembaga dapat meningkatkan efisiensi dalam mendeteksi dan mencegah ancaman yang timbul dari aktivitas orang asing di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis, Kodam Jaya telah menunjukkan kesiapan yang memadai untuk melaksanakan operasi intelijen strategis guna menghadapi ancaman dalam negeri. Implementasi strategi ini didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi canggih, dan koordinasi yang baik antar lembaga. Meskipun demikian, terdapat tantangan yang masih perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya dan akses terhadap data operasional yang lebih rinci.

Keberhasilan operasi intelijen strategis memerlukan pendekatan yang terintegrasi, penguatan kerjasama lintas instansi, serta pembaruan regulasi dan pedoman operasional. Dengan langkah-langkah tersebut, Kodam Jaya dapat terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam *Teori Intelijen*, *Teori Keamanan Nasional*, *Teori Implementasi*, *Teori Strategi*, dan *Teori Kampanye Militer*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penerapan operasi intelijen strategis di Kotama Ops TNI, khususnya di wilayah Kodam Jaya, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Berdasarkan analisis dan wawancara dengan narasumber kunci seperti Asintel Mabes TNI dan Asintel Kasad, terbukti bahwa sinergi antar-lembaga, pemanfaatan teknologi canggih, serta perencanaan strategis yang matang menjadi elemen utama keberhasilan operasi ini.

Teori Intelijen, yang menekankan pentingnya pengumpulan dan analisis informasi, sangat relevan dalam konteks ini, di mana pengumpulan data intelijen melalui teknologi seperti drone dan SIG memberikan keunggulan dalam mendeteksi ancaman. Selain itu, Teori Keamanan Nasional mendukung pentingnya respons cepat terhadap ancaman domestik seperti terorisme dan kejahatan siber. Teori Organisasi dan Struktur Organisasi menunjukkan bahwa



koordinasi antar-lembaga seperti TNI, Polri, dan BIN sangat krusial dalam operasi yang melibatkan berbagai elemen negara.

Kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Namun, Kodam Jaya telah menunjukkan kesiapan yang memadai melalui modernisasi peralatan dan pelatihan berkelanjutan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Teori Implementasi dan Teori Strategi.

Penelitian ini merekomendasikan adanya pembaruan regulasi yang lebih spesifik, peningkatan koordinasi antar-lembaga, serta pengembangan buku petunjuk operasional yang rinci untuk mengurangi ambiguitas di lapangan. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan terintegrasi, Kodam Jaya memiliki potensi besar untuk menjaga stabilitas nasional melalui operasi intelijen strategis yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S. (2016). Peran pemerintah menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 4(01), 83-101.
- Bermana, S., Prakoso, L. Y., Patmi, S., Al-Mujaddid, T. F., Habibie, S. Y., Susmoro, H., ... & Gunawan, R. (2025). UNDERWATER SURVEILLANCE PERTAHANAN LAUT INDONESIA.
- CNN Indonesia. (2023, 4 Maret). *Kronologi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang*. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230304070523-20-920733/kronologi-kebakaran-depo-pertamina-plumpang>
- Chotimah, H. C. (2019). *Tata Kelola Keamanan Siber dan Diplomasi Siber Indonesia di Bawah Kelembagaan Badan Siber dan Sandi Negara* [Cyber Security Governance and Indonesian Cyber Diplomacy by National Cyber and Encryption Agency]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 10(2), 113-128.
- Febrianto, A. Y., & Mufidah, N. Z. (2019). Batasan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Operasi Intelijen Negara. *Rechtidee*, 14(2), 245-26
- Nugroho, T. A., & Wahyudi, T. (2018). Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(3), 275-293.
- Pedrason, R. P. R. (2021). *Buku Ajar Keamanan Nasional*. Jakad Media Publishing.
- Purwanto, S., Purnomo, M. R., & Budiman, H. (2025). POWER DYNAMICS IN DECISION MAKING: A QUALITATIVE ANALYSIS. *POWER*, 2(1), 80-86.



-
- Satrio Prakoso, R. (2019). *IMPLEMENTASI IMAGE PROCESSING PADA DRONE QUADCOPTER PENGINTAI UNTUK OPERASI INTELIJEN TEMPUR DI DAERAH RAWAN* (Doctoral dissertation, POLITEKNIK ANGKATAN DARAT).
- Sugiyono. (2015) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta. Bandung, hlm. 9
- Sutopo, A. (2022). *Interoperability Pesawat Terbang Tanpa Awak Dan Kapal Perang Untuk Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia*. Strategi dan Kampanye Militer (SKM), 8(2), 77-100.
- Wanzira, A. M. (2022). *Perlindungan Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM di Papua* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Widyaningsih, R. (2019). *Deteksi Dini Radikalisme*. Purwokerto: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman.